BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Menurut rumus kimianya, air merupakan senyawa yang terdiri dari senyawa hidrogen (H_2O) dan senyawa oksigen (O) yang kemudian menjadi H_2O . Manusia sendiri sebagian besar tubuhnya terdiri dari cairan atau air, jadi dapat diketahui apabila tubuh manusia kekurangan air apa yang akan terjadi.

Dehidrasi adalah salah satu akibat dimana tubuh manusia kekurangan kandungan air secara keseluruhan. Jadi orang dewasa setidaknya harus mengonsumsi air murni atau air mineral sekitar 2 liter. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi serta untuk menjaga keseimbangan tubuh dan metabolismenya. Terutama untuk orang-orang yang tinggal atau bekerja di tempat yang panas disarankan untuk meminum lebih banyak air. Selain itu, air didalam tubuh manusia juga menjadi alat transportasi zat-zat makanan yang sudah dicerna dan untuk melarutkan berbagai zat didalam tubuh.

Berbicara mengenai air minum, air minum adalah air yang dikonsumsi sehari-hari oleh manusia untuk kebutuhan tubuh. Menurut departemen kesehatan, air minum memiliki ciri-ciri tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Air minum bisa didapatkan melalui air bersih yang

dimasak terlebih dahulu, atau dapat juga air yang tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Salah satu jenis air minum yang beredar di masyarakat adalah air botol atau Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah merupakan air minum yang siap dikonsumsi secara langsung tanpa proses pemanasan terlebih dahulu. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diproses dalam beberapa tahap baik menggunakan proses pemurnian air (*Reverse Osmosis/Tanpa Mineral*) maupun proses biasa *Water Treatment Processing* (Mineral), dimana sumber air yang digunakan untuk air kemasan mineral berasal dari mata air pegunungan. Untuk air kemasan non mineral biasanya dapat juga digunakan dengan sumber mata air tanah/mata air pegunungan. Proses Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus melalui tahapan baik secara klinis maupun secara hukum. Secara *higienis* klinis biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi dan lain-lain. Tahapan secara hukum biasanya melalui proses pengukuhan merek dagang, hak paten, sertifikasi dan asosiasi yang mana keluhannya mengacu pada peraturan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kode SNI No. 01-3553-2006 tentang standar baku mutu air dalam kemasan, serta kode MD yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang merupakan standar baku kimia, fisika, mikrobiologis. Kini pemerintah menerapkan Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) wajib memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 69 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan wajib SNI pada AMDK. Selain itu, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) wajib dibubuhi tanda SNI pada setiap produk kemasan. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

Selain Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ada juga air yang cukup dikenal oleh masyarakat muslim ialah air zam-zam. Air zam-zam konon dipercaya sebagai air yang mujarab oleh umat Islam. Beberapa keistimewaan air zam-zam antara lain obat berbagai penyakit, khasiat dan keberkahan yang diinginkan tergantung niat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, banyak orang yang berbondong-bondong membawa pulang air zam-zam setelah mereka melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tetapi ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, tidak semua jamaah berkesempatan membeli atau membawa pulang oleh-oleh dari Tanah Suci salah satunya air zam-zam. Jadi, tidak sedikit dari mereka yang memilih membeli air zam-zam di Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa oknum yang melakukan tindak pidana terhadap air zam-zam. Air tersebut merupakan air isi ulang yang kemudian dikemas ke dalam botol seperti Air Minum Dalam

Kemasan (AMDK) maupun jerigen dan diberi label seolah-olah dari Makkah. Tentu saja hal ini menyebabkan jamaah atau konsumen merasa dirugikan.

Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹ Para pelaku usaha yang seharusnya saling menguntungkan, malah ingin menguntungkan diri sendiri dan tidak memperdulikan nasib konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha telah merugikan jamaah haji atau konsumen dengan memperjual belikan air zam-zam palsu. Maka, konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan aturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena memakai atau mengonsumsi makanan. Aturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semata-mata:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 145

beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sebab itu, dalam membuktikan benar atau tidaknya ada suatu tindak pidana terhadap perlindungan konsumen, diperlukanlah suatu sistem pembuktian.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.² Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.³ Beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.

Dalam melakukan sistem pembuktian, diperlukanlah beberapa alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukannya.” Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau

² Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59

³ Ipakit, Ronaldo. *Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4 No. 2, 2015

tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjtuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah,”
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli/saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terkdakwa. Pentingnya saksi ahli atau keterangan ahli sangat diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana, terutama untuk perkara pidana khusus. Saksi ahli merupakan salah satu alat bukti sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Saksi ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Seorang ahli artinya orang yang mempunyai keahlian khusus (sesuai dengan bidang pengetahuannya). Saksi ahli berperan menambah keyakinan bagi penegak hukum apabila terjadi keraguan dalam pemeriksaan, serta sebagai alat bantu bagi hakim dalam menemukan kebenaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum mengenai **“Peran Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Kasus Air Zam-Zam (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ahli dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ahli dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam melakukan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan di ilmu hukum, keterampilan di bidang penegakkan hukum dan menambah kepustakaan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi, lembaga hukum maupun masyarakat agar memiliki gambaran bagaimana peran saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam.

E. Terminologi

Terminologi dari judul penelitian ini adalah:

1. Saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
2. Saksi ahli menurut Pasal 186 KUHAP saksi ahli atau keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Pada Pasal 1 butir 28 tercantum: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”⁴

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 88

3. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Pembuktian, berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.⁵ Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶
5. Perkara pidana menurut Prof. Moeljanto S.H., tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷
6. Air zam-zam adalah air yang dianggap air suci oleh umat Islam. Zam-zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Kabah, berkedalaman 42 meter.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metodologi Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis.

Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data

⁵*Ibid*, hal. 22

⁶ Diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/pada> Selasa, 18 September 2018 pukul 20:09 WIB.

⁷ Diakses dari http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA pada Rabu, 03 Oktober 2018 pukul 10:47 WIB

⁸ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Zamzam> pada Minggu, 23 September 2018 pukul 10:10 WIB

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan, dan makalah tentang pemecahan perkara pidana tetapi dilakukan juga penelitian langsung di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti yang dikumpulkan melalui sumber yang telah ada. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
 - a) Buku-buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel
 - d) Karya ilmiah
 - e) Makalah
 - f) Koran
 - g) Majalah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah buku catatan, alat tulis serta *smartphone*.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Polda Jawa Tengah, khususnya Reserse tindak pidana khusus.

6. Analisis Data

Dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknis analisis, yang berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992, hal. 16)⁹

⁹Diakses dari <http://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/08/reduksi-data.html> pada Jumat, 09 November 2018 pukul 20:11 WIB

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyajikan atau menampilkan data-data yang didapat di lapangan dalam suatu penelitian.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan ini merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara serta diverifikasi.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir merupakan inti atau hasil akhir dari suatu pembahasan yang dijabarkan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

1. Bab I PENDAHULUAN yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pengertian-pengertian dari tujuan pustaka dalam proposal penelitian. Bagian ini juga memuat penjelasan secara ringkas tentang tindak pidana, hukum pembuktian dan tindak pidana menurut Islam.
3. Bab III HASIL PENELITIAN dan pembahasan yang memuat pembahasan rumusan masalah yang ada, yaitu berupa peran ahli dalam pembuktian

perkara pidana kasus air zam-zam dan kendala-kendala serta solusi yang dihadapi penyidik dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam.

4. Bab IV PENUTUP memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.